

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pada Bab ini peneliti akan menyajikan terkait dengan latar belakang masalah yang ada di lapangan yang membuat peneliti tertarik melakukan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi tesis.

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Mewujudkan warga negara yang melek politik adalah tujuan dari pendidikan politik. Pendidikan dan politik adalah dua elemen yang sangat penting dalam sistem sosial politik di setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Keduanya sering dilihat sebagai bagian yang terpisah dan tidak memiliki hubungan apa-apa, tetapi keduanya saling menunjang dan saling mengisi. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat di negara tersebut. Begitu juga sebaliknya, lembaga - lembaga dan proses politik di suatu negara membawa dampak besar pada karakteristik pendidikan disuatu negara tersebut.

Generasi muda telah diberikan kesempatan, ini terlihat dari Inpres No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda. Dalam Inpres tersebut disebutkan tujuan pendidikan politik adalah merupakan pedoman kepada generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuan

pendidikan politik lainnya adalah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia.

Adapun yang menjadi target dari pada pendidikan politik adalah menyamakan visi dan persepsi berbangsa dan bernegara, kesadaran sebagai warga negara yang baik, persatuan dan kesatuan sesama generasi muda. Untuk mencapai target tersebut, materi yang dikembangkan dalam proses pendidikan politik meliputi wawasan nusantara, UUD NRI Tahun 1945, UU keormasan dan keorpolan, sistem pemilu dan lain-lain. Melalui materi ini, diharapkan dapat mengembangkan nilai-nilai budaya politik dan berdemokrasi, persatuan dan kesatuan bangsa, patriotisme, dan kejuangan (Sumantri, 2003: 1. 15).

Pendidikan politik bagi generasi muda sejak dini amatlah vital dalam mendukung perbaikan sistem politik di Indonesia. Pengetahuan sejak dini terhadap komponen-komponen kenegaraan, arti nasionalisme, hak dan kewajiban, sistem pemerintahan, pemilu, dan segala seluk-beluk politik akan melahirkan orang-orang yang berkapasitas dan memiliki arah dalam perbaikan bangsa dan negara. Ketimbang orang-orang yang beranjak dari perut lapar dan modal awal, yang ujung-ujungnya adalah makan sebanyak-banyaknya ketika menjabat (Arnaldi, Kompas).

Pendidikan politik adalah aktivitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada individu. Ia meliputi keyakinan konsep yang memiliki muatan politis, meliputi juga loyalitas dan perasaan politik serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik. Di samping itu, ia bertujuan agar setiap individu mampu memberikan partisipasi politik yang aktif di masyarakatnya. Pendidikan politik merupakan aktivitas yang terus berlanjut sepanjang hidup manusia dan itu tidak mungkin terwujud secara utuk kecuali dalam sebuah masyarakat yang bebas. ([http://cuap-cuap-ah.bogjurnalistik - onlain.com/wordpress/?p=15](http://cuap-cuap-ah.bogjurnalistik-onlain.com/wordpress/?p=15))

Konstruktivisme sosial meneguhkan asumsi bahwa individu-individu selalu berusaha memahami dunia di mana mereka hidup dan bekerja. Mereka mengembangkan makna-makna subjektif atas pengalaman-pengalaman mereka, makna-makna yang diarahkan pada objek-objek atau benda-benda tertentu. Makna-makna ini pun cukup banyak dan beragam sehingga peneliti dituntut untuk lebih mencari kompleksitas pandangan-pandangan ketimbang mempersempit makna-makna menjadi sejumlah kategori dan gagasan (Creswell, 2010).

Peneliti berusaha mengandalkan sebanyak mungkin pandangan partisipan tentang situasi yang tengah diteliti, dalam hal ini adalah pandangan mengenai makna pendidikan politik. Untuk mengeksplorasi pandangan-pandangan ini, pertanyaan-pertanyaan pun perlu diajukan. Pertanyaan - pertanyaan ini bisa jadi sangat luas dan umum sehingga partisipan dapat mengkonstruksi makna atas situasi tersebut, yang biasanya tidak asli atau tidak dipakai dalam interaksi dengan orang lain. Semakin terbuka pertanyaan tersebut tentu akan semakin baik, agar peneliti bisa mendengarkan dengan cermat apa yang dibicarakan dan dilakukan partisipan dalam kehidupan mereka. Makna-makna subjektif ini sering kali dinegosiasi secara sosial dan historis. Makna-makna ini tidak sekedar dicetak untuk kemudian dibagikan kepada individu-individu, tetapi harus dibuat melalui interaksi dengan mereka (karena itulah dinamakan konstruktivisme sosial) dan melalui norma-norma historis dan sosial yang berlaku dalam kehidupan mereka sehari-hari. Makna-makna itu juga harus ditekankan pada konteks tertentu dimana individu-individu ini tinggal dan kerja agar peneliti dapat memahami latar belakang historis dan kultural mereka. Konstruktivisme lebih menekankan pengembangan konsep dan pengertian yang mendalam (Creswell, 2010)..

PKn sebagai pemberdayaan warga negara akan selalu relevan dalam masyarakat demokratis sampai kapanpun. Agenda reformasi untuk

mengembangkan masyarakat madani (*civil society*) merupakan hasil dari pemberdayaan warga negara. Oleh karena itu, sebenarnya orientasi PKn akan memperkuat berkembangnya *civil society*, sebab PKn sendiri merupakan pembelajaran pendidikan politik secara eksplisit, yakni mengajarkan bagaimana menyalurkan aspirasi dengan baik sebagai partisipan yang dapat berpartisipasi secara efektif dan bertanggung jawab.

Dalam hal ini eksistensi pendidikan politik sebagai sosialisasi politik sangat dibutuhkan dalam implementasi pembentukan siswa sebagai warga negara yang melek politik melalui komponen-komponen *civic knowledge, civic skills dan civic dispositions* sebagai pradigma baru PKn. *Civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan) merupakan materi substansi yang harus diketahui oleh warga negara yang berkaitan dengan hak-kewajiban / peran sebagai warga negara dan pengetahuan yang mendasar tentang struktur dan sistem politik, pemerintahan dan sistem sosial yang ideal sebagaimana terdokumentasi dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, maupun yang telah menjadi konvensi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta nilai-nilai universal dalam masyarakat demokratis serta cara-cara kerjasama untuk mewujudkan kemajuan bersama dan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat Internasional (Affandi, 1996:27).

Perlunya peneliti mengkaji tentang konstruksi pendidikan politik pada sekolah menengah atas adalah sejak tercapainya kemerdekaan, telah tumbuh banyak paham / aliran serta organisasi politik yang diwarnai

keanekaragaman orientasi politik di luar Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang menyebabkan bangsa Indonesia hidup dengan banyak aliran politik. Selain itu, pembangunan bangsa Indonesia pada dasarnya bersifat terbuka. Dengan demikian, unsur – unsur dari luar mudah mempengaruhi perkembangan dinamika bangsa Indonesia. Melalui pendidikan politik diharapkan terbentuk warga negara yang berkepribadian utuh, berketerampilan, sekaligus juga berkesadaran yang tinggi sebagai warga negara yang baik, sadar akan hak dan kewajiban serta memiliki rasa tanggung jawab yang dilandasi oleh nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, pentingnya dilakukan penelitian dalam mengkonstruksi pendidikan politik adalah untuk mengetahui bagaimana siswa, guru, dan pemerintah memaknai pendidikan politik dan bagaimana kajian pendidikan politik. Maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Konstruksi Pendidikan Politik pada Sekolah Menengah Atas di Kota Pangkalpinang”. (Studi Kasus pada Siswa SMA Negeri 1 Pangkalpinang dan SMA Depati Amir Pangkalpinang). Dipilihnya SMA Negeri 1 Pangkalpinang, karena sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah yang mendapatkan bantuan oleh salah satu kandidat Calon Gubernur pada saat pencalonan berlangsung, sedangkan SMA Depati Amir Pangkalpinang tidak mendapatkan bantuan apa pun dari beberapa kandidat calon Gubernur. Oleh karena itu, peneliti mencoba

meneliti konstruksi pendidikan politik pada Sekolah Menengah Atas dalam pandangan guru, siswa dan pemerintah.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain: kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, komunikasi politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui tentang seluk beluk tentang partai politik. Pendidikan politik pada hakekatnya merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa sebagai upaya edukatif yang mendalam, disengaja dan sistematis untuk membentuk individu melek politik, baik dalam segi pengetahuan, kemampuan, maupun keterampilan.

Penelitian ini didasarkan pada pengembangan makna pendidikan politik pada SMA N 1 Pangkalpinang dan SMA Depati Amir Pangkalpinang. Dalam hal ini, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Mengkonstruksikan makna-makna dari berbagai pandangan menjadi suatu penafsiran tentang pendidikan politik.
2. Mengkonstruksikan kajian-kajian atau ruang lingkup pendidikan politik pada Sekolah Menengah Atas di Kota Pangkalpinang.
3. Banyaknya bentuk model atau metode yang digunakan dalam pembelajaran pendidikan politik oleh para guru di Sekolah Menengah Atas Kota Pangkalpinang.

4. Beberapa pandangan tentang bentuk atau implementasi dari pembelajaran pendidikan politik pada Sekolah Menengah Atas di Kota Pangkalpinang.

### **C. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan identifikasi masalah yang telah dideskripsikan, penulis dapat merumuskan masalah yang mengarah pada proses analisis selanjutnya, yakni:

1. Bagaimana makna pendidikan politik pada Sekolah Menengah Atas di Kota Pangkalpinang?
2. Bagaimana kajian atau ruang lingkup pembelajaran pendidikan politik pada Sekolah Menengah Atas di Kota Pangkalpinang?
3. Bagaimana guru membuat model pembelajaran pendidikan politik pada Sekolah Menengah Atas di Kota Pangkalpinang?
4. Bagaimana bentuk atau implementasi pembelajaran pendidikan politik berdasarkan ruang lingkup dan model pembelajaran pendidikan politik pada Sekolah Menengah Atas di kota Pangkalpinang?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam makna pendidikan politik pada Sekolah Menengah Atas di Kota Pangkalpinang.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam kajian atau ruang lingkup pembelajaran pendidikan politik pada Sekolah Menengah Atas di Kota Pangkalpinang.

3. Mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam model pembelajaran pendidikan politik pada Sekolah Menengah Atas di Kota Pangkalpinang.
4. Mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam bentuk atau implementasi pembelajaran pendidikan politik berdasarkan ruang lingkup dan model pembelajaran pendidikan politik pada Sekolah Menengah Atas di kota Pangkalpinang.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Praktis**

- a. Sebagai bahan ulasan dan kajian bagi para guru dan siswa untuk lebih memahami dan mempelajari konstruksi pendidikan politik.
- b. Untuk membantu para guru dan siswa untuk lebih memahami makna dari pendidikan politik.
- c. Bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk melakukan kajian atau penelitian lanjut tentang masalah yang sama atau masalah lain yang berkaitan.

### **2. Manfaat Teoritis**

Dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang pendidikan politik untuk menambah wawasan pengetahuan, memperoleh pengalaman baru, serta menambah khasanah pustaka.

## **F. Struktur Organisasi Tesis**

Sebagai pendahuluan, Bab I menyajikan latar belakang permasalahan, memberi konteks munculnya masalah, identifikasi dan perumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi tesis.

Dalam Bab II, disajikan kajian pustaka. Kajian pustaka berisi tentang deskripsi, analisis konsep, teori-teori dan penelitian terdahulu yang relevan mengenai pendidikan politik dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Bab III mengenai metodologi penelitian menguraikan lokasi dan subjek penelitian, metode penelitian, pendekatan penelitian, penjelasan istilah, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data.

Bab IV disajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis data untuk menghasilkan temuan yang berkaitan dengan masalah penelitian, pertanyaan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan pembahasan atau analisis temuan.

Selanjutnya dalam Bab V disajikan kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian. Rekomendasi yang ditujukan kepada pembuat kebijakan, kepada pengguna hasil penelitian, dan kepada peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan penelitian selanjutnya.